

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Konsep Politik

##### 1. Pengertian politik

Sebelum membahas lebih luas tentang politik, maka penulis perlu mengkaji lebih dahulu tentang arti dari politik. Secara umum politik diartikan sebagai penataan kota. Pandangan tersebut diambil dari asal usul kata politik itu sendiri di mana politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang artinya Negara atau kota, dari bahasa serapan Belanda disebut dengan *politiek* yang artinya proses<sup>18</sup>. Jadi politik diartikan sebagai segala aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan dalam masyarakat untuk menegakkan peraturan dan ketetapan yang telah di sepakati bersama dengan tujuan untuk terciptanya masyarakat, Negara dan kota yang aman, tentram, damai dan sejahtera.

Seorang filsuf bernama Aristoteles cukup terkenal pada zamannya, Filsuf tersebut banyak belajar dari gurunya Socrates, Aristoteles memberi pemahaman tentang politik dalam bukunya yang berjudul *politeia*. Pemikiran Aristoteles tentang Politik cukup dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada yaitu Athena. Politik di Athena saat itu memberi kebebasan kepada rakyat untuk turut

---

<sup>18</sup>Morgentahau, *Politik Antar Bangsa*, 82.

berpartisipasi dalam memberi dan mengambil keputusan jika telah memenuhi syarat, yaitu diperuntukan bagi laki-laki dewasa dan pernah menjadi pahlawan Negara. Aristoteles kemudian mengamati bahwa sebenarnya politik hanya dijadikan sebatas ilmu pengetahuan semata yang dimanfaatkan oleh para politisi. Hal tersebut nyata dari keterlibatan para politisi dalam pembuatan undang-undang, penegak hukum, dan pendiri institusi-institusi. Aristoteles memandang Athena dalam kaitannya dengan politik mengatakan bahwa politik yang sementara dikerjakan oleh pihak berwajib hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat formal dalam Negara.<sup>19</sup> Hal formal tersebut saat ini diartikan sebagai konstitusi Negara. Lanjut Aristoteles mengatakan bahwa politik yang sehat, baik dan benar adalah memberikan kehidupan yang layak bagi semua anggota masyarakat.<sup>20</sup> Jadi, mestinya kekuasaan dan jabatan tinggi diterapkan dan dijalankan sebagai suatu otoritas untuk menata, memperbaiki dan meninjau kebaikan bersama.

Pandangan Plato tentang politik dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Charisma Sande mengatakan bahwa politik adalah suatu proses yang berlangsung antara masyarakat dan penguasa (pemerintah) untuk mencapai suatu arah kebijakan bersama. Politik selalu berkaitan

---

<sup>19</sup>Aristoteles, *Filsafat Politik Aristoteles; Revisi Ke 17* (Jakarta: Momentum, 2017), 127.

<sup>20</sup>Ibid.

erat dengan keputusan pemerintah,<sup>21</sup> segala hal yang disepakati oleh pimpinan negara menjadi penentu tentang baik dan tidaknya politik itu bisa diterima. Lanjut Sande mengemukakan pandangan Plato tentang politik bahwa politik itu adalah suatu seni dan keindahan yang dapat membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi semua orang.<sup>22</sup> Politik dapat tercapai dengan baik jika antara pemerintah dan masyarakat terjalin hubungan yang hakiki. Politik harus dijadikan sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan, refleksi hidup tentang kesenangan, dan dialog atau interaksi secara seimbang.

Dasar konsep politik Plato berawal dari pemikirannya tentang negara yang ideal. Dia mengatakan bahwa negara Athena telah dijadikan sebagai jalan keserakahan, sebagai alat untuk memuaskan keinginan, buruknya sistem pemerintahan, nasib hidup rakyat yang tidak terpikirkan dan sistem pemerintahan yang tidak pernah berubah. Hal tersebut yang mendorong Plato untuk membuat konsep berfikir filsafat tentang negara yang ideal, bahwa sistem pemerintahan yang baik harus berdasar pada konsep tentang idea, yaitu kebaikan.<sup>23</sup> Konsep kebaikan dapat diperoleh jika warga negara memiliki budi pekerti dan pengetahuan yang bijak. Artinya bahwa pemerintah dalam berpolitik mesti disinari dengan akal pengetahuan yang sehat dan benar untuk

---

<sup>21</sup>Charisma Sande, "Studi Teologis Pandangan Plato Terhadap Politik," *Filsafat dan Teologi* 3, no. 2 (2023): 217.

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Plato, *Pandangan Plato Tentang Republik: Edisi Revisi* (Jakarta: Momentum, 2017), 72.

menuntun dan menolong dalam pengambilan keputusan dan penentu arah kebijakan yang baik dan benar.

Parek mengatakan bahwa politik itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuat keputusan yang didukung oleh instrument yang bersifat otoritatif dan korensif.<sup>24</sup> Labolo mengartikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menentukan keputusan dan arah kebijakan dalam mencapai suatu kerja sama yang baik.<sup>25</sup> Kemudian Adelia Fitri mengartikan politik sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan publik dan pemerintah.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi tentang politik di atas, maka penulis mengatakan bahwa politik adalah segala unsur yang berhubungan dengan negara, keputusan pemerintah, undang-undang, dan kebijakan pemerintah negara dan daerah dalam mewujudkan cita-cita dan harapan hidup masyarakat. Keterikatan pemerintah dan masyarakat yang terwujud dalam kebersamaan dan kesepakatan bersama dapat melahirkan politik yang sehat, aman dan tentram, sebaliknya jika antara pengambil keputusan dan rakyat terjadi kerenggangan, niscaya akan melahirkan kehancuran negara secara cepat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa konstitusi menjadi senjata yang dapat menolong rakyat

---

<sup>24</sup>Parek, *Keberagaman Budaya Dan Teori Politik*, 82.

<sup>25</sup>M. Labolo, *Dinamika Politik Dan Pemerintah Lokal* (Bandung: Balai Pustaka, 2015), 19.

<sup>26</sup>Adelia Fitri, "Dinasti Politik Dan Pemerintah Di Tingkat Lokal," *Ilmu Pemerintahan* 1, no. 4 (2019): 180.

berdebat dengan para penguasa yang sewenang-wenang mengambil dan menjalankan keputusan. Namun, pada prinsipnya konstitusi menjadi hayalan semata yang tidak berfaedah sama sekali. Sama seperti yang dikatakan oleh Jimly bahwa aturan dibuat untuk dilanggar".<sup>27</sup> Kalimat tersebut sebenarnya mau menunjukkan sikap kekecewaan terhadap negara oleh karena perangkai undang-undang justru menjadi perusak undang-undang, pengawas undang-undang justru menjadi pelanggar. Oleh sebab itu, tidak heran jika Morgentahau mau mengatakan bahwa politik memang tidak sehat karena dijalankan, dikelola serta di kerjakan oleh para oknum yang tidak paham tentang politik.<sup>28</sup> Makanya Plato menegaskan bahwa seharusnya yang mesti menjadi politisi adalah yang punya ide kebaikan, punya kebijaksanaan, dan punya pikiran yang telah dijernikan dengan berbagai cinta dan kasih sayang oleh ilmu pengetahuan.

## 2. Pengertian Money Politic

Setelah pembahasan singkat tentang politik di atas, maka penulis perlu menganalisis tentang politik yang di jalankan dengan uang atau yang lazim didengar dengan istilah *money politic*. Tetapi sebelum membahas hal ini lebih dalam, perlu diketahui bahwa terdapat berbagai jenis yang sering di sebut dengan permainan uang (*money politik*). Nisa

---

<sup>27</sup>Jimly Asshidiqie, *Aturan Dan Hukum Dalam Alkitab* (Jakarta Pusat: Prenamedia, 2011), 176.

<sup>28</sup>Morgentahau, *Politik Antar Bangsa*, 68.

Nabila menyebutkan bahwa *money politic* terdiri dari gratifikasi, judi, korupsi, perdagangan rahasia seperti penjualan obat-obatan, narkoba, minum-minuman keras dan pengelapan dana desa,<sup>29</sup> ini adalah segala bentuk *money politic* yang tidak dihalalkan oleh negara dan agama, khususnya di Indonesia. Salah satu perbuatan *money politic* yang paling umum diketahui adalah pada proses pemilihan umum. Peraturan perundang-undangan tentang pemilu No. 7 tahun 2017 jelas menegaskan bahwa negara tidak pernah menyetujui tindakan politik uang yang berlangsung dalam situasi pemilu (pemilihan umum), bahkan pelaku akan diberikan sanksi yang berat terhadap *money politic* di masa kampanye dan saat pemungutan suara.<sup>30</sup> Perbuatan tersebut tidak hanya merusak keluarga dan martabat seseorang, tetapi juga merusak cita-cita dan tujuan dibentuknya negara.

Arta menyebut dalam buku dokumennya bahwa *money politic* pertama kali dimulai di Indonesia sejak pemerintahan Hindia Belanda abad ke 20 saat diterapkannya sistem politik demokrasi dalam pemilihan umum. Konsep tersebut berpengaruh besar terhadap jajaran pemerintahan Belanda saat itu di Indonesia.<sup>31</sup> *Money politic* atau politik uang berasal dari dua kata yaitu *money* dan politik. *Money* yang artinya

---

<sup>29</sup>Nisa Nabila, "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," *Notarius* 1, no. 13 (2020): 164.

<sup>30</sup>Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Dalam Proses Pemilihan Umum," *Antikorupsi Integritas* 5, no. 1 (2023): 64.

<sup>31</sup>K.S Arta and I.M Pageh, "Politik Penataan Kota Singaraja Zaman Kolonial Belanda (Perspektif Sejarah Kota)," *IKA* 14, no. 2 (2017): 216.

uang dan politik yang artinya penataan, jadi *money politic* adalah penataan yang dijalankan dengan uang.<sup>32</sup> Sukma Nur mengartikan *money politic* sebagai ruang untuk menata diri lebih buruk.<sup>33</sup> Sedangkan Begouvic mengartikannya *money politic* itu sebagai cara halus pemerintah menindas rakyat.<sup>34</sup> Namun, karena *money politic* memang merupakan sesuatu yang dianggap tabu dan negatif, maka pandangan yang paling mendekati adalah argumen dari Sukama Nur. Jadi, *money politic* berarti tindakan yang dilakukan oleh pihak calon legislatif dan eksekutif melalui model pembagian uang atau sembako kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantasi hak pilih rakyat berpaut kepadanya.

Di Indonesia sekarang *money politic* bukan lagi sesuatu yang tersembunyi dan tabu, tetapi telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan terbuka. Hal tersebut terbukti dari beberapa video yang diupload ke media sosial yang mengutarakan secara terang-terangan aktivitas dari *money politic*. Salah satunya video yang diupload di akun Tik Tok Vebry Tri Haryadi yang mengutarakan bentuk kekecewaan kepada suatu masyarakat desa yang tidak dengan sepenuhnya berpaut kepada calon legislatif yang bersangkutan, padahal amplop yang disebar sangat

---

<sup>32</sup>Carlton Clymer Roders, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), 15.

<sup>33</sup>Primandha Sukma Nur, "Partisipasi Politik Pemili Pemula Dalam Pemilihan Umum," *Pendidikan Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2018): 176.

<sup>34</sup>Eza Helyatha Begouvic, "Perkembangan Money Politik Di Indonesia," *Ilmiah Hukum* 2, no. 4 (2021): 216.

memadai.<sup>35</sup> Perbuatan tersebut telah ditindak lanjuti oleh pihak bawaslu (badan pengawasan pemilihan umum) secara tegas. Kemudian dalam akun Youtube CNN (Cable News Network) Indonesia juga mengutarakan bentuk *money politic* yang dilakukan oleh kandidat calon eksekutif terhadap masyarakat di Semarang dengan maksud dan tujuan untuk menarik hati masyarakat berpaut kepadanya.<sup>36</sup> Masih terdapat beberapa aktivitas *money politic* lainnya yang sempat ditindaki oleh pihak bawaslu (badan pengawas pemilihan umum).

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi di atas, maka sebetulnya di beberapa daerah di Indonesia telah lama melakukan tindakan *money politic*. Salah satunya seperti di wilayah Sa'dan, disebuah desa terpencil, Toraja Utara. Mengapa masyarakat melakukan tindakan tersebut? Atas dasar apa masyarakat melakukan ini? Dan apa yang mesti dilakukan oleh gereja sebagai wakil dari Allah? Apa pendapat masyarakat tentang aktifitas *money politic*? Bagian tersebut akan dijelaskan secara rinci oleh penulis pada bagian hasil penelitian. Setelah penulis menguraikan secara singkat tentang *money politic* di atas atas beberapa pandangan dan defenisi dari beberapa para ahli, maka bagian selanjutnya penulis mencoba mengamati tentang bagaimana pandangan agama Kristen tentang *money politic*

---

<sup>35</sup>Vebry Tri Haryadi, *Politisi Money Politik* (Jakarta, 2024).

<sup>36</sup>CNN Indonesia, "Laporan Ketidakadilan Proses Pradilan Terbanyak," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191207003444-20-454948/Lbh-Jakarta-Laporan-Ketidakadilan-Proses-Peradilan-Terbanyak>.



### 3. Money Politik Di Tengah Masyarakat

Praktik *money politik* adalah sebuah isu yang marak terjadi di tengah-tengah kompleksitas masyarakat. Tujuan mulia dari politik adalah untuk penataan dan pembagunan dengan maksud untuk mendayagunakan dan memanfaatkan fasilitas untuk kesejahteraan bersama.<sup>37</sup> Pada dasarnya politik itu baik dan mendapat dukungan penuh dari agama dan pemerintah. Tetapi politik menjadi perusak kesejahteraan rakyat karena telah di gantikan dengan keegoisan dan ketamakan diri yang haus dengan harta kekayaan yang tidak halal.

Plato mendefenisikan politik itu sebagai *Polis* yang artinya negara. Plato menyetujui bahwa politik itu lahir dari perwujudan terhadap keadilan, oleh karenanya negara berdiri dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan bersama yaitu negara yang adil, damai dan penuh keharmonisan.<sup>38</sup> Negara tidak dapat berdiri tanpa dukungan dari rakyat dan rakyat tidak dapat hidup tanpa dukungan dari pemerintah. Oleh sebab itu, antara rakyat dan pemerintah tidak dapat dipisahkan melainkan hidup bersama dan saling melengkapi.

Lanjut Plato mengatakan bahwa suatu negara pasti diselimuti dengan rakyat yang hidup bersama dalam lokus kehidupan sosial, ekonomi dan tradisi. Mereka hidup berdampingan satu sama lain, atau

---

<sup>37</sup> Dahrendof, "Penyelesaian Konflik Dalam Perspektif Teoritis Dahrendof," 26.

<sup>38</sup> Plato, *Pandangan Plato Tentang Republik: Edisi Revisi*, 65.

juga membuat komunitas kelompok masing-masing. Namun, realitasnya adalah bahwa mereka sama-sama punya satu tujuan yaitu untuk kebaikan masa depan negara yang damai, aman dan tentram.<sup>39</sup> Platolah yang mendefenisikan politik sebagai bentuk penataan, pendayagunaan dan pemeliharaan terhadap masa depan bangsa.

Pandangan Aristoteles yang merupakan murid dari Plato mendefenisikan politik sebagai perumusan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Aristoteles mengungkapkan stegment berdasar terhadap realitas yang dihadapi oleh masyarakat Atena mengenai perilaku pemerintah dan rakyat.<sup>40</sup> Artinya bahwa sikap seorang pemerintah harus tercermin lewat moral, hukum dan agama. Kebaikan hanya dapat terwujud lewat kerjasama antara semua pihak masyarakat dan pemerintah dengan cara bahu-membahu mengangkat beban menjadi bagian bersama.

Lanjut Aristoteles memahami politik sebagai bentuk keanekaragaman manusia, dalam artian bahwa konsep berfikir setiap orang dalam memandang politik jelas berbeda. Namun, politik yang dianggap benar oleh aristoteles adalah tentang taktik dan cara yang tepat untuk mengenal dan menjalankan proses untuk membawa prubahan ke arah yang lebih baik. Bagi Aristoteles politik hanya akan membawa

---

<sup>39</sup> Ibid., 57.

<sup>40</sup> Aristoteles, *Filsafat Politik Aristoteles; Revisi Ke 17*, 43.

perubahan yang signifikan ke arah yang baik jika dijalankan berdasarkan kaidah dan norma yang ada.<sup>41</sup>

Seorang pemerintah yang baik bagi Aristoteles adalah mereka yang menguasai sikap berpolitik yang baik dan benar, bukan berdasar terhadap ketamakan, jabatan dan harta, melainkan tetap pada pendirian bahwa dipilih karena punya potensi dalam membawa perubahan yang radikal bagi negara dan rakyat. Politik adalah bagian dari seni yang hidup di tengah-tengah realitas masyarakat. Bagi Plato politik dalam masyarakat itu adalah bentuk untuk menata dan memperbaharui pola realitas kehidupan, dan bagi Aristoteles politik itu adalah penyatuan konsep berfikir dari berbagai keberagaman.

## **B. Pandangan Agama Kristen Tentang *Money politic***

Dasar ajaran kekristenan bersumber dari Alkitab, doktrin dan tata gereja. Alkitab adalah kumpulan dari beberapa tulisan yang isinya menerangkan tentang segala unsur kehidupan manusia dan kehendak Allah. Doktrin atau yang sering disebut dengan dokmatika Kristen adalah paham yang diyakini, diterima serta yang dipercaya oleh suatu aliran atau kepercayaan, biasanya selalu berhubungan dengan konsep keselamatan manusia. Sedangkan tata gereja adalah hasil pembicaraan yang menjadi

---

<sup>41</sup> Ibid., 55.

kesepakatan bersama untuk dipedomani dalam suatu kalangan secara luas.<sup>42</sup> Sudah barang tentu menjadi harapan bahwa dasar ajaran tersebut dapat dipedomani, diterapkan dan diwujudkan dalam lembaga dan pelayanan bersama.

Pertama-tama harus diketahui bahwa agama Kristen terlahir di Indonesia dengan suatu tujuan agar semua satu adanya di dalam Tuhan. Kekristenan berkembang dengan sangat pesat keberbagai daerah hingga terbentuknya satu lembaga yang menaungi keseluruhan aliran gereja. Lembaga tersebut diberi nama PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia) yang didirikan pada tahun 1940, Lembaga ini dulunya dinamakan dengan DGI (Dewan Gereja-Gereja Di Indonesia), tetapi karena atas kesepakatan dalam sidang raya di Ambon 1940 bahwa gereja bukanlah dewan tetapi persekutuan maka namanya kemudian di ganti menjadi PGI.<sup>43</sup> Impian besar dari PGI adalah bahwa supaya semua aliran-aliran gereja dalam lingkungan Kekristenan mewujudkan rasa solidaritas, cinta kasih, dan keharmonisan bersama.

Rasa solidaritas dan keharmonisan cukup terwujud dalam kalangan gereja-gereja bahkan terhadap agama-agama lain yang punya tujuan bersama untuk bersikap nasionalis memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Namun, sikap tersebut mulai memudar sejak tahun 1949, pada

---

<sup>42</sup>Christian Reynaldi, "Kitab Suci, Gereja Dan Otoritas : Harmonisasi Doktrin Kecukupan Alkitab Dengan Tradisi Gereja," *Teologi dan Pelayanan* 18, no. 1 (2019): 4.

<sup>43</sup>Pdt. Dr. Zakaria J. Ngelow, *Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia (1900-1950)* (Jakarta, 2018), 8.

peristiwa pengumuman pendirian negara Islam di Indonesia. Kasus tersebut terjadi ketika tokoh sarikat Islam bernama Kartosoewirjo mau mendirikan negara Islam di Indonesia, usaha tersebut dimulai dalam bentuk perlawanan kepada pemerintah Soekarno yang menghasut supaya Indonesia dijadikan sebagai negara Islam. Dasar pemikiran dari perlawanan Kartosoewirjo adalah bahwa pihak Belanda telah meninggalkan bekas jajahan lainnya seperti ajaran, buku-buku yang tidak berisi ajaran Islam, doktrin dan pengaruh terhadap masyarakat pribumi.<sup>44</sup> Namun usaha yang dilakukan Kartosoewirjo tidak membawa hasil yang memuaskan oleh karena perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah, maka pengikut-pengikut dari Kartosoewirjo mulai tidak bersahabat dengan pihak pemerintah dan juga kepada lingkup agama Kristen.

Saat ini, kekristenan bukan hanya bertolak belakang dengan agama-agama lain, tetapi juga dalam aliran sendiri. Sikap kekristenan tidak lagi terwujud seperti pada umumnya. Para umat mulai saling mengejek, mencaci maki, menyalahkan, bahkan membunuh. Suatu sikap yang tidak hanya merusak lembaga dan organisasi tetapi juga dapat merusak cita-cita mulia negara. Elekana Goro mengatakan dalam karyanya bahwa agama Kristen tidak di utus dengan tujuan untuk memanipulasi, mengotori, dan

---

<sup>44</sup>Verelladevanka, *Kartosoewirjo Pendiri Negara Islam Indonesia Pada Tahun 1949* (Jakarta, 2021).

menghilangkan sikap toleransi beresama, tetapi sebaliknya dapat mewujudkan nilai-nilai sosial dan keharmonisan dalam negara.<sup>45</sup>

Salah satu hal yang merusak kehidupan Kristen saat ini adalah aktivitas *money politic*, dalam Keluaran 23:8 menyatakan bahwa “sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar”, juga ditegaskan kembali dalam Ulangan 16:19 yang menyatakan bahwa “janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Penekanan penting dari teks tersebut adalah bahwa politik uang adalah larangan dari Tuhan. Perintah tersebut disampaikan Allah kepada Musa untuk diedukasikan kepada orang Israel dengan satu poin penting bahwa suap dapat membutakan mata manusia. Jika, dikontekstualisasikan dalam kehidupan kekristenan, maka tindakan ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi pelaku dan penerima suap seperti kebohongan, takti haram, kemunafikan, dan pelanggaran terhadap agama. Jadi, jelas bahwa *money politic* dilarang keras oleh Alkitab.

Politik uang juga ditekankan dalam beberapa konsep doktrin gereja. Aliran gereja Kharismatik dalam doktrin tentang hukum moral mengenai poin yang mengatakan “mengikat seluruh umat manusia sebagai aturan

---

<sup>45</sup>Elakana Goro, “Perkembangan Agama Kristen Protestan,” *Teologi Sistematis dan Praktika* 2. no.4 20 (2019): 5.

untuk hidup” memberi memori penjelasan bahwa pelanggaran moral tidak hanya berhubungan dengan Alkitab, tetapi juga terhadap pemerintah dan negara.<sup>46</sup> Artinya bahwa norma kehidupan masyarakat bukan hanya soal urusan spritualitas tentang Tuhan saja, tetapi juga bersangkutan paut terhadap ketaatan akan undang-undang negara, salah satunya melawan gratifikasi. Kemudian doktrin dalam aliran gereja Advent tentang gereja dan kehidupan manusia, memberi penekanan dalam memori penjelasannya bahwa gereja yang kudus adalah gereja yang punya misi tentang arah kebijakan dan kebaikan umat manusia.<sup>47</sup> Gereja hadir untuk menerima dan menolak perilaku manusia yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Artinya bahwa gereja dengan tegas bersikap menegur, menasihati sekaligus membimbing umat Allah yang terjerumus ke dalam ranah politik yang dirusak oleh ketamakan harta. Gereja Toraja sendiri menganut paham prinsip presbiterial sinodal, yang artinya gereja yang dipimpin oleh Pendeta, penatua dan diaken. Ketiga unsur tersebut punya tujuan, geops, dan gerakan yang sama, meskipun dipimpin oleh satu orang yang disebut dengan pimpinan majelis jemaat, namun pada prinsipnya konsep pemikiran tentang arah kebijakan dan perkembangan gereja itu sama. Salah satu tujuan principal dari gerakan prisbiterial sinodal adalah satu dalam pelayanan bersama melalui reinternalisasi. Anake Rantung mengatakan bahwa jika

---

<sup>46</sup>Wilfred J. Samuel, *Doktrin Kristen Kharismatik* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007), 69.

<sup>47</sup>David Soputra, “Meningkatkan Kehidupan Saling Mengasihi Dan Akuntabilitas Gembala Jemaat Sebagai Upaya Penangkalan Ujuk Rasa Di Gereja Advent,” *Filsafat dan Teologi* 9, no. 1 (2021): 128.

prinsip tersebut dikontekskan dalam ranah politik, maka sebenarnya aktivitas politik juga perlu didasarkan pada keadaan reformasi, bahwa politik mesti ditata kembali supaya menjadi suatu kebaruaran dalam konsep bergereja dan bersosial.<sup>48</sup> Rantung lanjut mengatakan bahwa *money politic* tidak boleh diterapkan dalam kehidupan gereja, karena aktivitas ini dapat merusak persatuan, persaudaraan dan keharmonisan warga jemaat.<sup>49</sup>

Katekismus gereja Protestantisme pada poin ke tiga yang mengatakan bahwa “gereja Kristen berkewajiban untuk mengamalkan iman dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan.<sup>50</sup> Pada poin ketiga tersebut menolong umat untuk berpijak berdasarkan arah kebijakan politik yang berlandaskan iman dan kemaslahatan diri. Nisa Nabila dalam karya tangannya menggambarkan bahwa setiap kali menjelang pemilu para kandidat calon legislatif ataupun eksekutif melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kursi di parlemen. Para Caleg dengan tidak segan-segan mengeluarkan uang puluhan juta bahkan puluhan juta rupiah dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat melalui pencetakan stiker, poster, baliho, serta uang untuk para tim suksesnya. Selain cara seperti ini, banyak juga kandidat yang melakukan ritual-ritual seperti berendam di

---

<sup>48</sup>Djoys Anake Rantung, “PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN POLITIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MAJEMUK DI INDONESIA,” *Shanan* 1, no. 2 (2017): 176, <https://doi.org/10.33541/shanan.v1i2.1492>.

<sup>49</sup>Ibid., 127.

<sup>50</sup>Iqnatius Sumaryo, *Peran Umat Katholik Di Dalam Kehidupan Politik: Kongregasi Untuk Ajaran Iman Roma Bagi Kristus Raja* (Jakarta: Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2003).



malam hari di air sungai dan air laut, bertapa di hutan ataupun di gua-gua, mandi tengah malam dari berbagai sumber mata air, dan memohonkan bantuan dari para dukun atau orang-orang pintar.<sup>51</sup> Percaya atau tidak realitas tersebut memang lazim terjadi di tengah-tengah masyarakat, ada yang melakukan model kampanye dengan benar namun, terdapat juga aktivitas politik yang melanggar aturan. Oleh sebab itu, gereja tidak hanya menyebarluaskan tentang hidup beriman, tetapi juga soal keadaan dan situasi dalam kehidupan sosial.

Menjadi jelas bahwa politik uang dilarang keras oleh agama Kristen. Dalam ceramah yang dilakukan oleh Bapak Pdt. Oktavianus mengatakan bahwa uang yang diperoleh secara tidak halal tidak akan pernah membawa damai dan sukacita dalam keluarga.<sup>52</sup> Justru sebaliknya dapat membawa dampak buruk bagi beberapa hal. Lanjut Oktavianus mengatakan bahwa uang yang didapatkan atas hasil kerja keras dan pengorbanan yang besar akan lebih nikmat dibandingkan dengan hasil yang diperoleh secara ilegal. Setiap agama pasti mengajarkan prinsip kebaikan bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada satupun agama yang punya keinginan supaya pemeluknya bersikap dan bertindak kriminal. Oleh sebab itu, sebagai umat Kristen perbuatan *money politic* hendaknya dapat dihindari, bukan hanya dilarang oleh agama tetapi juga dilarangan keras oleh negara Indonesia.

---

<sup>51</sup>Nisa Nabila, "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," 87.

<sup>52</sup>Pdt. Oktavianus, *Seminar tentang Diskusi Cerama Pemilu Dan Money Politik*, tanggal 13 Maret 2024, pukul 09.00

### C. Kepemimpinan Majelis Gereja

*Leadership* dalam bahasa Indonesia dituliskan dengan kepemimpinan yang artinya model dan proses dalam memimpin. Secara etimologinya kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang artinya tuntun, bimbing, dan arah. Pemimpin berarti pelaku atau pelaksana dalam menuntun dan membimbing, sedangkan pimpinan berarti kepala yang bertanggungjawab dalam mengepalai sekaligus mampu mempengaruhi orang lain.<sup>53</sup> Dalam pembahasan ini penulis secara khusus akan membahas tentang pemimpin dan memimpin. Dua kata yang cukup berbeda tetapi berkesinambungan.

Pemimpin berasal dari bahasa Ibrani yang dituliskan dengan *halak* yang artinya pengendali, penganjur, atau pembimbing, bahasa Yunannya dituliskan dengan *hegemoai* yang artinya memimpin atau mengarahkan.<sup>54</sup> Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pemimpin dalam beberapa bagian yaitu; orang yang memimpin, petunjuk atau pedoman, memandu, melatih dan mengajar. Peter Scazzero mengartikan pemimpin sebagai person yang mampu mengatur kelompok, organisasi dan keluarga.<sup>55</sup> Humaidi menyebut pemimpin sebagai orang yang punya kharisma, kecakapan, keahlian, dan punya pengaruh dilingkungan lokasi kepemim

---

<sup>53</sup>Harries, *Pemimpin Dan Memimpin* (Yogyakarta: Balai pustaka, 2007), 18.

<sup>54</sup>Ibid., 20.

<sup>55</sup>Peter Scazzero, *The Emotionally Healthy Leader: Pemimpin Yang Sehat Secara Emosi* (Jawa Timur: literatur perkantass jawa timur, 2020) 23.

pinannya.<sup>56</sup> Agama Kristen mengartikan pemimpin sebagai wakil Allah yang dipercayakan tanggungjawab untuk menjadi panutan bagi umat-Nya dan yang harus di hormati.<sup>57</sup> Keluaran 18:21 menyatakan “carilah orang-orang yang cakap dari segala bangsa, orang-orang yang bertakwa, yang dapat dipercaya dan membenci suap, dan tempatkan orang-orang tersebut diantara manusia sebagai pemimpin ribuan, ratusan, lima puluh dan sepuluh. Dengan demikian, pemimpin berarti pelaksana, pengarah serta kepala dari suatu organisasi atau perusahaan yang punya tanggungjawab dalam mengarahkan, membimbing serta mendidik anggota-anggota bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab dan yang membenci aktifitas suap.

Pemimpin merupakan individu yang harus dapat dipercaya. Hasil ceramah diskusi yang dilaksanakan oleh Santari Tedan tentang sikap kepala, menggambarkan bahwa pemimpin itu ibarat ikan. Ketika ikan memasuki proses pembusukan, itu tidak dimulai dari ekor tetapi selalu bermula dari kepala hingga berpengaruh ke seluruh bagian tubuh dan daging.<sup>58</sup> Hal tersebut memberi makna kepada seorang pemimpin bahwa apabila seorang kepala tidak bertanggungjawab, tidak mampu memberi pengaruh bahkan tidak kolektif dengan pekerjaan, secara otomatis akan berpengaruh juga

---

<sup>56</sup>Alie Humaidi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal Dalam Pengurangan Resiko Bencana* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 23.

<sup>57</sup>Dei Winarto, “Pemimpin Yang Melayani Menurut Kisah Para Rasul 6-13,” *Teruna Bhakti* 2, No. 1 (2019): 12.

<sup>58</sup>Santari Tedan, *Ceramah Diskusi Pemimpin Yang Bertanggungjawab* (Toraja, 2019).

kepada anggota bawahan, dan lambat laun organisasi atau perusahaan tersebut akan bangkrut, mati dan punah.

Setelah mengetahui tentang apa itu pemimpin, maka selanjutnya perlu diketahui tentang sekilas mengenai memimpin. Secara umum memimpin adalah bentuk kata kerja yang berasal dari bahasa Inggris yang dituliskan dengan kata *lead* yang berarti menyebabkan, membawa, menjalani, menuju dan menuntun.<sup>59</sup> Dedi mengartikan memimpin sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan untuk mencapai suatu tujuan yang dimaksud.<sup>60</sup> Sedangkan Winarto mengistilahkan memimpin sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari seorang atasan, memimpin menjadi suatu penentu berhasil tidaknya seseorang dalam mengarahkan sekaligus membawa organisasi atau perusahaan ke arah yang di inginkan secara bersama.<sup>61</sup>

Memimpin cukup berpengaruh terhadap perilaku atasan. Siagian mengatakan bahwa efisiennya pekerjaan dan terselenggaranya program kerja bergantung terhadap kualitas dari seorang pemimpin.<sup>62</sup> Model tutur kata, penampilan, kewibawaan, dan kharisma yang melekat dalam diri seorang pemimpin menjadi cerminan bagi anggota organisasi dan perusahaan. Tetapi, kualitas seorang pemimpin juga berdampak dari

---

<sup>59</sup>Harries, *Pemimpin Dan Memimpin*, 18.

<sup>60</sup>Dedi and Masri, "Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin," *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama 2*, no. 5 (2021): 29.

<sup>61</sup>Dei Winarto, "Pemimpin Yang Melayani Menurut Kisah Para Rasul 6-13," 29.

<sup>62</sup>Ronny Siagian, *Pemimpin Sejati: Tidak Hanya Dilahirkan, Tetapi Dipelajari Dan Dibentuk* (Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2019), 129.

perilakunya terhadap anggota, keluarga dan sosial kemasyarakatan. Hubungan yang baik dengan sesama menjadi ciri khas dari seorang pemimpin sebagai bentuk kelengkapan dalam mengarahkan, membimbing, mendampingi serta mencapai tujuan. Namun, sebaliknya jika seorang pemimpin tidak mewujudkan hubungan yang baik dalam keluarga, sosial dan anggota maka tingkat kepercayaan dari bawahan akan semakin menipis.

Pemimpin dan memimpin adalah kedua hal yang tidak boleh dipisahkan. Pemimpin ada, maka sudah pasti model memimpin juga ada. Namun, yang paling menentukan dari segala unsur organisasi dan perusahaan adalah model memimpin. Pertama-tama harus diakui bahwa hancurnya suatu organisasi atau perusahaan dapat terjadi jika model memimpin dari seorang kepala tidak kolektif dan tidak berpengaruh terhadap tujuan dan cita-cita bersama. Citra dari suatu organisasi, lembaga atau perusahaan tercermin dari model kepemimpinannya. Dalam agama Kristen juga mempunyai pemimpin atau ketua. Mulai dari yang teratas hingga kepada organisasi intra gereja. Di Indonesia gereja-gereja dinaungi oleh lingkup PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), yang tentunya punya ketua (ketua PGI), kemudian ketua sinode, wilayah, klasis, jemaat, hingga organisasi dalam jemaat. Lingkungan gereja Toraja punya empat jenis organisasi dalam suatu jemaat, yaitu organisasi sekolah minggu,

pemuda, kamu bapa dan kaum wanita, yang masing-masing punya program sendiri tetapi satu dalam pelayanan bersama.

Setiap jemaat dilayani oleh majelis gereja yang dipilih dalam sidang diperluas dan ditetapkan dalam sidang majelis jemaat. Jumlah majelis gereja ditentukan secara langsung oleh jemaat setempat berdasarkan kebutuhan, situasi dan kondisi yang dihadapi dalam jemaat. Ada yang berjumlah kurang dari 10 anggota, 15 hingga 30 majelis. Dari jumlah majelis yang tersedia dibagi lagi dalam penatua dan diaken. Pembagian tersebut juga disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dalam jemaat. Tugas dan kewajiban dari penatua dan diaken di atur dalam tata gereja Toraja BAB IV tentang "Jabatan Gerejawi" Pasal 29 tentang jabatan gereja Pendeta, Penatua dan Diaken, yang mencantumkan tugas dan kewajiban dari penatua dan diaken dalam jemaat.<sup>63</sup> Satu jemaat dipimpin oleh satu majelis gereja yang ditetapkan sendiri oleh majelis gereja yang terpilih. Tugas dan tanggungjawab pimpinan majelis jemaat di atur dalam tata gereja Toraja pasal 29, BAB IV tentang jabatan penatua dan diaken.<sup>64</sup> *Money Politic* dan majelis gereja akan dijelaskan sendiri dalam pembahasan selanjutnya.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya *Money Politic***

Di tengah realitas dan kompleksitas manusia, terdapat empat jenis unsur yang mempengaruhi epektifitas kehidupan manusia yaitu; agama,

---

<sup>63</sup>Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, *Penyelarasan Tata Gereja Toraja* (Toraja: Sulo Rantepao, 2022), 19.

<sup>64</sup>Ibid.

sains, filsafat dan estetika. Sering kali dipahami bahwa agama adalah kunci yang memegang kendali dari ketiga unsur yang lain. Namun paham itu ditantang oleh Bikhu Parek bahwa keempat unsur tersebut harus berjalan bersama, dalam artian tidak ada yang lebih di utamakan dan yang direndahkan, melainkan selaras dan seimbang dalam lingkup kehidupan manusia.<sup>65</sup>

Pandangan umum manusia bahwa agama adalah jawaban dari segala unsur logika dan segala unsur seluk beluk pergumulan dan konflik sosial yang mendasar dalam realitas kehidupan manusia. Namun, konsep berfikir Albertus Sujoko menegaskan bahwa realitas manusia saat ini tidak lagi berpadanan sebatas pada inti agama, tetapi dari segi dan sisi kehidupan kemanusiaan yang lain.<sup>66</sup> Artinya bahwa jika agama tidak memberi jaminan kehidupan dan jawaban dari segala jenis pertanyaan yang menjadi pergumulan hidup, maka seorang individu akan mencari makna hidup pada sisi filsafat, sains dan estetik.

Agama jelas melarang aktivitas praktik *money*, namun agama tidak mampu memberi penjelasan sedetail mungkin tentang larangan Allah, aturan gereja, dan keburukan dari *money politic* itu, hanya sekedar sebatas pada alun-alun konsep buruk dari *money politic* itu. Untuk itu, lambat laun manusia di tengah kompleksitasnya akan hidup dan menikmati rasa

---

<sup>65</sup> Parek, *Keberagaman Budaya Dan Teori Politik*, 41.

<sup>66</sup> Albertus Sujoko, *Belajar Menjadi Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, n.d.), 42.

keamanaannya di tengah-tengah realitas dan status sosialnya. Salah satunya adalah praktik *money politic*. Praktik *money politic* adalah salah satu larangan dalam perundang-undangan, bahkan juga di tekankan dalam alkitab bahwa pemberian suap adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya aktivitis *money politic* yang dicetuskan oleh M. Labolo<sup>67</sup> yaitu;

1. Faktor Politik. Faktor ini sering kali menjadi pergumulan berat di tengah-tengah realitas kehidupan manusia bahwa sebagian besar kandidat calon legislatif dan eksekutif memberi diri menjadi anggota dewan sebatas pada keinginan bukan berdasar terhadap program dan tujuan untuk masa depan negara, melainkan untuk mendapatkan jabatan, harkat dan harta. Niat yang tidak bermoral tersebut menjadi sisi untuk menarik suara rakyat lewat praktik *money politik* yang dilakukan dengan cara memilih dan menetapkan anggota masyarakat menjadi bagian dari utusan (peluncur) untuk melakukan pendataan terhadap setiap anggota masyarakat untuk berpihak kepada salah satu calon dengan iming-iming uang yang dapat hilang dalam sekejap mata.

Pada dasarnya politik itu bernilai sehat, tetapi dapat merusak realitas kehidupan manusia apabila diterapkan dan dijalankan dalam cara yang tidak benar. Salah satunya menjadikan politik sebagai langkah untuk menarik simpati rakyat dengan memberikan iming-iming sepeser

---

<sup>67</sup> M. Labolo, *Dinamika Politik Dan Pemerintah Lokal*.



uang. Faktor utama terjadinya *money politic* adalah karena dorongan dari partai politik untuk mempengaruhi konsep berfikir dan perilaku masyarakat melalui teknik, taktik dan konsep yang cerdas dan unik melalui kerja sama dengan beberapa tokoh dan pakar politik.<sup>68</sup>

2. Faktor Ekonomi. Ceramah diskusi yang dilakukan oleh Jerri Parimba mengatakan bahwa penyebab paling mendasar terjadinya *money politic* adalah keadaan sosial yang menjadi keutamaan dan memberi dorongan pada individu dan anggota keluarga untuk terlibat dan melakukan praktik politik dengan satu dasar yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam hal ekonomi sandang dan papan.<sup>69</sup>

Teologi yang dilakukan oleh Jerry Parimba mengatakan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencukupi kebutuhan hidup ekonomi seperti bercocok tanam dan memelihara ternak, tidak sebatas pada persoalan berpolitik uang. Namun, kadang kala ekonomi menjadi cara dan jalan yang menjadi pegangan dalam melakukan praktik politik.<sup>70</sup>

3. Faktor Budaya. Wibowo mengatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya praktik *money politic* adalah karena realitas yang telah

---

<sup>68</sup> Nisa Nabila, "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia," 23.

<sup>69</sup> Parimba, Jerry "Seminar Nasional tentang: Perilaku Money Politik Di Tengah Kompleksitas Manusia", (Toraja, 2023, Pukul 09.00-11.00 WITA)

<sup>70</sup> Jery Parimba, "Rasionalitas Komunikasi Sebagai Pilihan Gereja Dalam Melawan Politik Uang Di Toraja," *Melo: Study Agama-Agama* 1, no. 1 (2021): 21.

terjadi.<sup>71</sup> Seseorang tidak akan mungkin melakukan praktik *money politic* tanpa melihat realitas orang lain disekelilingnya. Kebiasaan yang menjadi pola kebudayaan menghasilkan tren yang baru. Generasi bangsa yang lahir dalam realitas praktik *money politic* secara sepintas juga akan dipengaruhi oleh keadaan sosial yang telah terjadi.

Seperti halnya dengan aktivitas *money politic* yang terjadi secara drastic berkembang dan menjadi suatu realitas yang terjadi tanpa adanya kebiasaan. *Money Politic* lahir dan berkembang dalam realitas masyarakat sosial oleh karena tabiat dan kebiasaan yang ada. Ikha Sanjaya mengatakan bahwa seseorang tidak dilahirkan ke dalam dunia ini dengan maksud untuk melakukan perilaku buruk, tetapi karena pengaruh kebiasaan dan trend yang berkembang dalam realitas masyarakat sosial. Salah satunya adalah *money politic* yang merusak pola dan realitas kehidupannya<sup>72</sup>. Olehnya, kebiasaan menjadi salah satu bagian yang diciptakan oleh manusia oleh karena dorongan kebudayaan.

4. Faktor Ketamakan. Meskipun hukum dan agama telah melarang keras terjadinya perilaku *money politic*, namun sikap keduniawian yang tidak dapat terkontrol mengakibatkan sikap ketamakan semakin berkuasa dalam pesta demokrasi. Kegilaan terhadap harta kekayaan melahirkan

---

<sup>71</sup> Wiiowo and Detta Rahmawan, "Efikasi Politik Dan Jenjang Partisipasi Politik Pemilih Pemula," 14.

<sup>72</sup> ikha sanjaya, *Peranan IPTEK Dalam Kehidupan Manusia* (Surabaya: DEPUBLISH CV Budi Utama, 2015), 21.

kehancuran diri dan masa depan bangsa. Alkitab dalam 1 Timotius 6:10 menyatakan bahwa “akar dari segala kejahatan adalah cinta uang”. Cinta terhadap uang mengakibatkan kelupaan terhadap diri dan tujuan mulia dari demokrasi.

Salah satu penyebab terjadinya *money politic* adalah karena sikap ketamakan diri yang tidak terkontrol. Kenikmatan dari *money politic* memang menjanjikan tetapi kehancuran karena politik itu lebih mengecewakan. Memang sentuhan pertama terhadap harta mencoba merasuk ke dalam diri untuk menarik pikiran supaya menikmati kebahagiaan yang dapat dihitung dalam hitungan detik, tanpa menyadari bahwa harta itu adalah cara Iblis untuk merusak masa depan bangsa.

Pada dasarnya faktor penyebab terjadinya *money politic* memang sangat banyak, tetapi pada umumnya keempat faktor tersebut cukup menjadi bukti atas beberapa hasil penelitian sebelumnya, dan realitas sebenarnya. Faktor-faktor tersebut menjadi gambaran tentang penyebab terjadinya praktik *money politic* yang sangat merisaukan masyarakat.

#### **E. Peran Majelis Gereja Menghadapi *Money Politik***

Kata gereja berasal dari bahasa Yunani yang dituliskan *eklesia*, dan bahasa Ibraninya *qahal*. Secara etimologi kata Ekklesia berasal dari dua kata dasar yaitu *ek* dan *klesia* dari kata *kaleo*, *ek* yang artinya keluar dan *klesia* yang

artinya memanggil, sehingga *ekklesia* diartikan sebagai “dipanggil keluar” Dalam bahasa Portugis Belanda kata gereja dituliskan *igreja* yang berasal dari terjemahan Yunani yaitu *kuriake* yang artinya milik Allah.<sup>73</sup> Jadi, gereja diartikan sebagai kumpulan orang-orang kudus yang dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib yaitu Yesus Kristus. Netty mengartikan gereja sebagai kehidupan religious bersama kristen yang berpedoman terhadap penyelamatan Allah dalam bingkai Yesus Kristus yang di dalamnya Roh Kudus bekerja.<sup>74</sup>

Gereja digambarkan dalam dua jenis yaitu gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan adalah manusia yang hidup dalam persekutuan dengan segala aktivitas pelayanannya dengan berlandaskan iman terhadap Yesus Kristus<sup>75</sup>. Gereja yang kelihatan dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang tidak lagi berada dibawah kutuk dosa oleh karena hawa nafsu dan ketamakan, tetapi telah dibaharui dalam diri Yesus Kristus. Sedangkan gereja yang tidak kelihatan diartikan sebagai konsep iman orang-orang kudus, atau lebih spesifiknya diartikan sebagai karya Allah yang bekerja dalam diri kehidupan gereja.<sup>76</sup> Namun, sejatinya kedua arti tersebut tidak dapat dipisahkan, karena sama-sama dimaknai sebagai

---

<sup>73</sup>Anne Ruck, *Sejarah Gereja Asia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 18.

<sup>74</sup>Netty, “Konsep Pelayanan Kasih Menurut Surat 2 Korintus 8-9 Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Memberi Dalam Gereja,” *Instusional STT*, no. <http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/1113> (2011): 42.

<sup>75</sup>Timotius Sukarman, *Gereja Yang Bertumbuh Dan Berkembang: Pelayanan Siswa Terpadu Sebagai Bagian Pertumbuhan & Perkembangan Gereja* (Yogyakarta: ANDI, 2012), 42.

<sup>76</sup>dkk Eka Denis, “Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Santri Putri Pesantren X Yogyakarta,” *Kurios* 3. No.2 (2018): 240.

gereja Tuhan dan yang mencakup semua orang-orang kudus yang menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai juruslamat.

Setiap gereja di utus ke dalam dunia untukewartakan injil kepada segala mahluk.<sup>77</sup> Pewartaan yang dimaksud adalah tentang segala unsur kehidupan manusia dan alam sekitar. Sebagaimana gereja di artikan sebagai persekutuan orang-orang kudus maka hendaknya sikap gereja juga harus kudus terhadap sesama ciptaan. Gereja tidak semestinya merusak, mengotori bahkan mengeksploitasi sesama ciptaan. Penderitaan, pergumulan hidup, serta segala bencana juga adalah bagian dari gereja.<sup>78</sup> Olehnya gereja tidak boleh menutup mata terhadap setiap eksperesi warga jemaat dan ekologi.

Gereja dalam hubungannya dengan politik juga harus sepadan dengan pewartaan injil. Pertanyaan umum yang sering diutarakan adalah bolehkah gereja berpolitik? Pada dasarnya gereja dilarang untuk berpolitik oleh karena pandangan bahwa gereja itu adalah institusi/lembaga yang terdiri dari orang-orang kudus yang didirikan sendiri oleh Kristus dengan tujuan untuk memuliakan nama-Nya bukan dengan maksud untuk berpolitik. Zakaria J. Ngelow mengatakan dalam karyanya bahwa gereja itu kudus dan tidak boleh sama sekali dikotori dengan nafsu dan ambisi

---

<sup>77</sup>Kaventius Pambayun, "Strategi Gereja-Gereja Daerah Menyikapi Tantangan Pelayanan," *Teologi dan Pengembangan Pelayanan* 11, no. 1 (2021): 61.

<sup>78</sup>BPS Gereja Toraja, *Dari Benih Terkecil, Tumbuh Menjadi Pohon: Kisah Anton Dan Alida Van de Loosdrecht, Misionaris Pertama Ke Toraja* (Toraja: BPS Gereja Toraja, 2005), 54.

duniawi.<sup>79</sup> Kegiatan politik dilaksanakan dengan dorongan partai politik yang acap kali memaksakan kehendak partai dalam bentuk aspirasi kepada masyarakat.

Pada tahun 1945 setelah proses proklamasi kemerdekaan, di Indonesia yang demokratis pernah terbentuk beberapa partai politik kristen dengan nama Partai Politik Kristen, namun kembali dibubarkan atas pemikiran bahwa kekristenan tidak boleh turut berpolitik, karena politik itu kotor.<sup>80</sup> Belakangan ini para apologet dan teolog Kristen berpendapat bahwa gereja dan Negara mesti dipisahkan. Gereja tidak boleh mencampuri urusan negara dan sebaliknya, Negara tidak boleh mencampuri urusan gereja. Pemikiran para tokoh-tokoh teolog mengatakan bahwa jika para rohaniawan, uskup, pastor, dan pendeta-pendeta melibatkan diri dalam urusan politik, maka siapa yang akan mengurus umat-Nya, pelayanan terhadap kaum miskin akan terkendala, gerakan cinta Alkitab akan berhenti, dan kepedulian terhadap kaum yang tertindas akan terabaikan.<sup>81</sup> Atas dasar pertimbangan tersebut, memang harus diakui bahwa politik selalu sarat dengan kekuasaan, kejahatan, egoisme, dan koruptor. Namun bukan berarti bahwa antara Negara dan gereja tercipta dualisme yang cukup berbeda secara signifikan. Dalam ranah tanggungjawab memang nampak secara

---

<sup>79</sup>Zakaria J. Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama -Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," *Jaffray:Teologi dan Study Patoral* 12, no. 2 (2014): 72.

<sup>80</sup>Pdt. Dr. Zakaria J. Ngelow, *Kekristenan Dan Nasionalisme: Perjumpaan Umat Kristen Protestan Dengan Pergerakan Nasional Indonesia (1900-1950)*, 18.

<sup>81</sup>Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Berpolitik Praktis," *Teologi Biblika dan Praktika* 11, no. 2 (2023): 214.

sederhana perbedaan itu ada, tetapi secara eksklusif antara gereja dan negara saling bergandengan tangan untuk mencapai tujuan mulia negara Indonesia.

Di sisi lain gereja bukan anti terhadap politik. Dalam dokumen hasil keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja menerangkan bahwa apabila pendeta, penatua dan diaken berinisiatif untuk menjadi calon anggota dewan maka terlebih dahulu para pelayan tersebut dibuatkan surat keterangan tentang alih fungsi pelayanan.<sup>82</sup> Dalam artian bahwa duluhnya para pelayan berkecimpung dalam kehidupan gereja kini akan melayani dalam negara. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa gereja Toraja tidak melarang anggota jemaat-Nya berpolitik praktis, meskipun tetap ada batasan-batasannya. Oleh karenanya gereja mesti berjuang untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang pluralis, terutama untuk menyinari kegiatan politik yang sesuai dengan cita-cita reformasi dan nilai Pancasila. Gereja semestinya juga memahami posisinya di dunia ini yaitu sebagai agen dalam menghadirkan kerajaan Allah, sehingga gereja sepatutnya menggembalakan, mendialogkan keadilan dan kebenaran, serta mendampingi segala unsur aktivitas politik. Erman S. Saragih menuliskan dalam karyanya bahwa sikap gereja terhadap politik dapat diwujudkan dengan cara; menghargai Pancasila, mendukung reformasi kebangsaan, meningkatkan pelayanan perdamaian, turut serta dalam dunia

---

<sup>82</sup>Biro Data Informasi dan Komunikasi Gereja Toraja, *Hasil Keputusan Sidang Sinode Am Gereja Toraja XXV* (Toraja, 2021), 64.

kependidikan, bersatu sebagai teladan dalam kehidupan benegara dan bergereja, dan turut serta meningkatkan demokratis.<sup>83</sup>

Gereja, pemerintah dan tokoh masyarakat berjalan bersama mewujudkan sikap netralis terhadap politik. Tetapi diyakini bahwa yang paling dekat dengan kehidupan warga jemaat adalah tokoh-tokoh dalam gereja seperti pendeta, penatua dan diaken. Ketiga pelayan tersebut disitilahkan dengan kata majelis gereja atau kadang juga disebut dengan majelis jemaat. Dalam gereja Toraja tingkatakan majelis terdiri dari majelis sinode, majelis klasis, dan majelis jemaat. Secara harafiyah kata majelis sebenarnya berasal dari bahasa arab yang berarti tempat duduk, Nainggolan menyebutkannya sebagai suatu lembaga/institusi yang merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan yang sama.<sup>84</sup> Sedangkan jemaat dalam bahasa arab dituliskan *jamaah* yang artinya susunan, perkumpulan dan keterikatan. Jadi majelis jemaat diartikan sebagai sekelompok person yang saling terikat untuk duduk bersama. Gereja sendiri mengartikan majelis jemaat sebagai kelompok pelayanan yang dibentuk dalam gereja untuk mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai bagian dari panggilan.

Peran majelis gereja dalam menghadapi masyarakat yang kompleks tentu harus terarah dan kontekstual. Salah satunya adalah tentang tugas dan tanggungjawab majelis jemaat terhadap konflik *money politik*. Telah dibahas

---

<sup>83</sup>Erman S. Saragih, "Penatalayanan Gereja Dalam Berpolitik Praktis," 187.

<sup>84</sup>Nainggolan, "Peranan Pelayanan Majelis Gereja Terhadap Peningkatan Pelyanan Tri Tugas Panggilan Gereja Di HKBP Marindal Medan," *Repository* 4, no. 1 (2019): 9.



pada poin sebelumnya bahwa *money politik* adalah tindakan yang merusak kebersamaan, persaudaraan dan persekutuan dalam jemaat, oleh sebab itu majelis sebagai pemimpin dalam jemaat bertanggungjawab untuk mengedukasikan pengaruh negatif aktifitas *money politik* dalam bentuk hospitalitas. Haryadi menerangkan dalam karyanya tentang sikap *money politic* bahwa politik uang adalah pekerjaan Iblis yang dapat menghancurkan martabat keluarga, gereja dan masyarakat.<sup>85</sup> Yesda Tangdiseru lanjut menegaskan bahwa jika pemerintah tidak mampu bertindak maka gereja hadir untuk memberi solusi terhadap pergumulan politik yang umum terjadi.<sup>86</sup> Gereja tidak diutus hanya untuk domba-domba yang hilang tetapi juga beradvokasi menjawab pergumulan yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan.

Zakaria J. Ngelow menerangkan beberapa sikap gereja terhadap *money politic*, yang sebenarnya juga menjadi tanggungjawab majelis jemaat dalam mewujudkan efektivitas pemilihan umum dalam bentuk partisipasi terhadap negara, diantaranya sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Gereja mensosialisasikan bahwa *money politic* dapat membunuh demokrasi. Sistem pemerintahan Indonesia adalah demokrasi. Sistem ini diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang segala unsur

---

<sup>85</sup>Vebry Tri Haryadi, *Politisi Money Politik*, 17.

<sup>86</sup>Yesda Tangdiseru, "Pentingnya Manajemen Gereja Terhadap Pertumbuhan Gereja," *Eulogia* 1, no. 2 (2021): 31.

<sup>87</sup>Zakaria J. Ngelow, "Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama -Peran Gereja Dalam Politik Di Indonesia," 63.

keputusannya berada di tangan rakyat. Konsep yang berhubungan dengan demokrasi adalah pemerintahan itu berada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Cita-cita dari demokrasi adalah kesetaraan warga negara, menjamin hak-hak dasar rakyat, pembaharuan kehidupan sosial, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut juga menjadi tanggungjawab dari pihak gereja bahwa demokrasi akan hancur apabila didukung dengan uang. *Money politik* dalam pemilihan umum akan melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas yang tujuannya adalah untuk kekuasaan semata bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat secara umum. Oleh sebab itu, gereja penting mengambil bagian dalam momentum pesta demokrasi dengan mendialogkan bahwa cita-cita mulia dari demokrasi akan punah jika rakyat diupah dengan uang politik yang haram.

2. Gereja mentransformasikan bahwa *money politic* adalah larangan Alkitab. Sampai saat ini gereja belum sepenuhnya menunjukkan bahwa politik uang dilarang secara tegas dalam Alkitab. Masyarakat yang hidup dalam kompleksitas beranggapan bahwa larangan tentang *money politic* hanya diceramakan oleh para majelis gereja bukan sesuai dengan kaidah firman Tuhan. Oleh sebab itu, para pelayan gereja berkewajiban penuh dalam mewartakan bahwa aktivitas *money politic* merupakan larangan dari Allah. Keluaran 23:8 menyatakan "suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan

memutarbalikkan perkara orang-orang benar". Suap mengajarkan umat Allah untuk berbohong, mencuri dan memutarbalikkan kebenaran. Keluaran 18:21 juga menyatakan "di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap". Allah sendirilah yang mengajak umat-Nya untuk memilih seorang pemimpin yang cakap mengajar, penuh hikmat dan takut akan Allah. Tidak terdapat satupun kalimat dalam Alkitab yang menuliskan bahwa pilihlah orang-orang yang memberi uang, berwibah, dan berkelimpahan harta.

3. Gereja mengajarkan bahwa *money politic* tidak membawa kepada kelimpahan. Gunawan mengatakan bahwa harta yang diperoleh dengan haram (cuma-cuma) tidak akan pernah membawa kebahagiaan dan sukacita, tetapi hasil jerih payah yang didapatkan lewat usaha dan kerja keras membawa kenikmatan dan kedamaian dalam batin.<sup>88</sup>*Money politik* lahir dari prinsip yang tergolong tidak halal. Jelas bahwa undang-undang negara dan undang-undang pemilu menolak *money politik*, agama, gereja dan pemerintah secara konsep menilai *money politik* sebagai pelanggaran terhadap aturan, nilai dan norma. Oleh sebab itu, majelis jemaat sebagai unsur pemimpin dalam gereja bertanggungjawab

---

<sup>88</sup>AGUNG GUNAWAN, "Pemuridan Dan Kedewasaan Rohani," *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 5, no. 1 (2020): 28.

memberi edukasi bahwa unsur uang yang diperoleh secara tidak halal dari politik dapat menghilangkan sukacita, kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga, dalam gereja, politik uang merusak persekutuan, pelayanan dan efektifitas warga jemaat. Majelis jemaat bersama segenap pemerintah dan tokoh-tokoh gereja berjuang dalam mewujudkan rakyat yang hidup bebas dari aktifitas *money politik*.